

PERAN AKUNTAN MANAJEMEN DALAM PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Khairaningrum Mulyanti, M.Pd
Program Studi Akuntansi, Politeknik Pos Indonesia
khairani.mulyanti@gmail.com

ABSTRAK

Istilah *Good Corporate Governance (GCG)* dalam dunia bisnis dan perekonomian semakin populer. Hal ini disebabkan karena GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk mencapai keberhasilan baik dari segi finansial maupun persaingan dalam persaingan global. GCG memiliki beberapa prinsip dasar seperti, *fairness, transparency, accountability, stakeholder concern*, dan dengan diterapkannya prinsip dasar tersebut diharapkan perusahaan dan pada akhirnya perekonomian bangsa dapat bangkit menuju arah yang lebih sehat dan mampu bersaing.

Salah satu faktor internal yang menjadi pendorong keberhasilan pelaksanaan praktik GCG dalam sebuah perusahaan adalah adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik terutama *stakeholder* dapat memahami dan mengikuti perkembangan dan dinamika perusahaan. Tugas seorang akuntan manajemenlah untuk menjadi penyedia informasi yang dibutuhkan oleh para *stakeholder* tersebut.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai peran akuntan manajemen dalam penerapan *Good Corporate Governance* di dalam sebuah perusahaan. Data yang digunakan adalah data kualitatif berupa literatur, yaitu buku-buku dan jurnal ilmiah. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik survey literatur, kemudian diolah dengan menggunakan prosedur analisis isi (*content analysis*).

Penelitian ini tidak meninjau aspek lain dalam penerapan *Good Corporate Governance*, sehingga diharapkan pada penelitian berikutnya dapat ditinjau aspek-aspek lain untuk memperkaya perspektik dalam memahami *Good Corporate Governance*. Selain itu, penelitian ini hanya berada pada tataran konsep sehingga perlu diverifikasi dan dilakukan penelitian lebih lanjut agar dapat menggambarkan realita di lapangan.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance (GCG)*, akuntan manajemen

ABSTRACT

The terms of Good Corporate Governance (GCG) in the business world and the economy is getting popular. This is because GCG is one key to a successful company to achieve success in terms of both financial and competition in the global competition. GCG has few basic principles such as fairness, transparency, accountability, stakeholder concerns, and with the implementation of the basic principles and the company is expected in the end the nation's economy may rise toward a more healthy and able to compete.

One internal factor that drives the successful implementation of corporate governance practices in a company is the disclosure of information for the public to be able to understand every movement and management measures within the company so that the public, especially stakeholders can understand and follow the development and dynamics of the company. The job of an accountant manajemenlah to be a provider of information needed by those stakeholders.

This study has the objective to gain an understanding of the role of the management accountant in the implementation of good corporate governance in a company. The data used is data kualitatif the form of literature, namely books and scientific journals. Data collected by using literature survey, then processed using content analysis procedures (*content analysis*).

This study did not review other aspects of the implementation of Good Corporate Governance, so hopefully in the next study can be reviewed other aspects to enrich perspectives in understanding the Good Corporate Governance. In addition, this study only at the level of concept that needs to be verified and to conduct further research in order to describe the reality on the ground.

Keywords: Good Corporate Governance (GCG), management accountant

A. PENDAHULUAN

Krisis finansial di berbagai negara di tahun 1997-1998 yang diawali krisis di Thailand (1997), Jepang, Korea, Indonesia, Malaysia, Hongkong dan Singapura yang akhirnya berubah menjadi krisis finansial Asia dipandang sebagai akibat lemahnya praktik *Good Corporate Governance (GCG)* di negara-negara Asia. Ini disebabkan adanya kondisi-kondisi obyektif yang relatif sama di negara-negara tersebut antara lain adanya hubungan yang erat antara pemerintah dan pelaku bisnis, konglomerasi dan monopoli, proteksi, dan intervensi pasar sehingga membuat negara-negara tersebut tidak siap memasuki era globalisasi dan

pasar bebas (Arifin, 2005). Di Indonesiapun penerapan GCG masih sangat kurang. Terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Booz Allen (dalam Arifin 2005) yang mengevaluasi kualitas *Corporate Governance* di negara-negara ASEAN, menempatkan Indonesia di peringkat yang paling bawah. Fenomena tersebut menunjukkan hal yang memprihatinkan. Walaupun sudah banyak aturan dan kebijakan-kebijakan yang ada untuk meningkatkan penerapan GCG, namun dalam praktiknya masih belum optimal.

Melihat fenomena-fenomena di atas menunjukkan bahwa kebutuhan akan pelaksanaan GCG sudah merupakan kebutuhan yang mendesak bagi suatu organisasi. Sehingga menjadi keharusan bagi perusahaan-perusahaan untuk menerapkan dan melaksanakan GCG agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Manfaat perusahaan menerapkan praktek GCG adalah *resources* yang dimiliki pemegang saham perusahaan dapat dikelola dengan baik, efisien dan digunakan semata-mata untuk kepentingan pertumbuhan (nilai) perusahaan. Semua itu dilakukan perusahaan untuk dapat maju dan bersaing secara sehat. Hal ini berarti bahwa *Good Corporate Governance* tidak saja berakibat positif terhadap pemegang saham namun bagi masyarakat luas berupa pertumbuhan perekonomian nasional.

Pemegang saham mendelegasikan pengambilan keputusan bisnis kepada manajer yang merupakan agen atau perwakilan dari pemegang saham. Dalam hal pengambilan keputusan, tentu saja harus berdasarkan informasi yang dihasilkan oleh perusahaan yang terkait. Informasi berupa laporan keuangan disajikan oleh manajer/agen dalam hal ini akuntan, sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban pengelolaan kekayaan pemilik yang diamanahkan kepadanya.

Peran akuntan manajemen menjadi sangat penting terutama dalam hal penyajian informasi akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan secara transparan kepada pemakainya. Seorang akuntan manajemen adalah bagian dari manajemen perusahaan sehingga dia terlibat langsung dalam aktivitas perusahaan, dan menurut teori keagenan dalam *Corporate Governance* akuntan manajemen merupakan bagian dari agen, sehingga perilaku akuntan manajemen dapat dikatakan sebagai perilaku agen. Akuntan manajemen dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu, dan dapat dibandingkan dengan indikator-indikator yang sama. Oleh sebab itu akuntan manajemen mempunyai kontribusi bagi keberhasilan dan peningkatan aplikasi *Good Corporate Management* dalam sebuah perusahaan.

Berdasarkan pendahuluan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran akuntan manajemen sesungguhnya dalam penerapan *Good Corporate Governance* dalam sebuah perusahaan yang nantinya akan berpengaruh pada *performance* perusahaan dan pada akhirnya akan berpengaruh juga pada perekonomian bangsa.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Good Corporate Governance

Dalam menerapkan *Corporate Governance*, perusahaan perusahaan publik juga wajib mengindahkan pedoman pedoman prinsip prinsip *good corporate governance* yang dikeluarkan badan pengelola pasar modal atau bursa efek masing masing Negara. Kinerja perusahaan akan baik jika perusahaan menggunakan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Konsep GCG pertama kali dikemukakan oleh Cadbury Committee pada tahun 1992 melalui *Cadbury Report* (Mas, 2005:7), dalam tulisannya Cadbury menyatakan bahwa GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan daam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholders* khususnya dan *stakeholders* pada umumnya. Hal tersebut tentu saja berkaitan dengan kewenangan direktur, manajer, emgang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkebagan perusahaan di lingkungan tertentu.

Definisi GCG sesuai dengan Surat Keputusan MenteriBUMN NO Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerpn GCG pada BUMN adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya berlandaskan peraturan perundang-unangan dan nilai-nilai etika. Definisi ini menekankan pada keberhasilan usaha dengan memperhtikan akuntabilitas yang berlandaskan peraturan perundangan dan dan nilai-nilai etika serta memperhatikan *stakeholders* yang bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan nilai pemegang saham.

Good corporate governance pada dasarnya menyangkut masalah pengendalian perilaku para eksekutif puncak perusahaan untuk melindungi kepentingan pemilik perusahaan (pemegang saham). Masalah *corporate governance* dapat ditelusuri dari pengembangan *agency theory* yang menjelaskan bagaimana pihak pihak yang terlibat dalam perusahaan (manajer, pemilik perusahaan dan kreditor) akan berperilaku karena mereka pada dasarnya memiliki kepentingan yang berbeda.

Dalam buku berjudul *Corporate Governance Concept and Model*, 2009 yang disusun oleh tim Center for Good Corporate Governance Universitas Gadjah Mada (CGCG-UGM), dipaparkan sejumlah teori yang menjelaskan dan menganalisis tentang *corporate governance* (CG). Beberapa teori tersebut antara lain teori keagenan (*agency theory*), teori biaya transaksi (*transaction cost theory*), dan teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*).

a. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan dinyatakan pertama kali oleh Jensen and Meckling pada tahun 1976 (Warsono,dkk.,2009). Jensen and Meckling menyebut manajer suatu perusahaan sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Pemegang saham mendelegasikan pengambilan keputusan bisnis kepada manajer yang merupakan agen atau perwakilan dari pemegang saham. Manajemen diberikan wewenang dalam kebijakan pengambilan keputusan sehingga manajemen diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada secara maksimal untuk menyejahterakan pemilik baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan dasar teori keagenan ini dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Manajemen dianggap perlu melakukan pelaporan dan pengungkapan mengenai perusahaan kepada pemilik sebagai wujud akuntabilitas manajemen terhadap pemilik (Rianto & Surya, 2013)

b. Teori Biaya Transaksi (*Transaction Cost Theory*)

Teori biaya transaksi dikemukakan pertama kali oleh Williamson tahun 1996 (Warsono,dkk.,2009). Teori ini didasarkan pada kenyataan bahwa perusahaan telah menjadi sedemikian besar sehingga, sebagai akibatnya, mereka memanfaatkan pasar dalam menentukan alokasi sumber daya. Dengan demikian pergerakan harga di pasar akan menentukan produksi dan pasar itu sendiri yang mengkoordinasikan transaksi-transaksi. Manajemen perusahaan berkepentingan untuk menginternalisasi sebanyak mungkin transaksi guna meminimalkan resiko dan ketidakpastian mengenai harga dan kualitas produk dimasa yang akan datang. Hal ini dapat dilakukan melalui integrasi vertikal. Namun, apabila biaya transaksi internal menjadi terlalu mahal dibanding biaya transaksi melalui mekanisme pasar, maka perusahaan akan menggunakan transaksi internal. Dalam hal ini manajer berperan sebagai pengambil keputusan dalam menentukan transaksi.

c. Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholders Theory*)

Dasar teori pemangku kepentingan adalah bahwa perusahaan telah menjadi sangat besar, dan menyebabkan masyarakat menjadi sangat *pervasive* sehingga perusahaan perlu melaksanakan akuntabilitasnya terhadap berbagai sektor masyarakatnya dan bukan hanya kepada pemegang sahamnya saja. Hubungan antara pemangku perusahaan pada gilirannya akan menyebabkan bukan sekedar perusahaan yang mempengaruhi pemangku kepentingan, akan tetapi sebaliknya, pemangku kepentingan akan mempengaruhi perusahaan.

Corporate governance merupakan sebuah sistem yang terdiri dari fungsi-fungsi yang dijalankan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memaksimalkan penciptaan nilai perusahaan sebagai entitas ekonomi maupun sebagai entitas sosial, menurut Anton (2012) fungsi-fungsi dan pihak-pihak yang terkait dalam penerapan CG adalah sebagai berikut:

1. *Oversight*, perhatian secara bertanggung jawab oleh Dewan Direksi
2. *Enforcement*, penegakan oleh Pejabat Eksekutif
3. *Advisory*, pemberian saran oleh Dewan Komisaris atau Komite
4. *Assurance*, pemantauan oleh pemeriksa/auditor
5. *Monitoring*, pemantauan oleh pemangku kepentingan.

Pelaksanaan *good corporate governance* diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut ini (IICG, 2001):

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan *corporate value*
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan dividen.

Esensi *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan baru (Amas, 2005), GCG memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif sehingga tercipta mekanisme *checks and balances* di perusahaan.

Untuk melaksanakan GCG, IICG (2001) mengungkapkan beberapa prinsip pelaksanaannya yang berlaku secara internasional sebagai berikut:

1. Hak-hak para pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.
2. Perlakuan sama terhadap pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang

saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta elarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (*insider trading*)

3. Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerja sama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang kepentingan dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan
4. Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan (*stakeholders*).
5. Tanggung jawab pengurus manajemen, pengawasan manajemen, serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham.

Dari lima hal di atas Anton (2012) mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat dijadikan titik acuan bagi para regulator (pemerintah) dalam membangun *framework* bagi penerapan GCG, dan menjadi pedoman dalam mengelaborasi *best practices* bagi peningkatan nilai dan kelangsungan hidup perusahaan.

Menurut FCGI (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*) terdapat empat unsur utama yang penting dalam *Corporate Governance*, yaitu Keadilan (*Fairness*), Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*) dan Pertanggungjawaban (*Responsibility*).

a) *Fairness* (kewajaran)

Fairness yaitu perlakuan yang sama, adil, dan setara terhadap para pemegang saham terutama kepada para pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing dengan keterbukaan informasi penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (*insider trading*). *Fairness* diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan *prudent*, sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara *fair*. Selain itu dengan dilaksanakan prinsip ini diharapkan memberi perlindungan kepada perusahaan terhadap praktik korporasi yang merugikan (Mas, 2005: 13).

b) *Disclosure and Transparency* (Keterbukaan Informasi)

Disclosure and transparency yaitu pengungkapan dan transparansi hak-hak para pemegang saham yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat sesuai pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan perusahaan yang mendasar atas perusahaan dan turut memperoleh keuntungan perusahaan. Pengungkapan yang tepat dan akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan serta para pemegang kepentingan (*stakeholders*).

Dalam mewujudkan transparansi, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Menurut Mas Achmad (2011:9), setiap perusahaan diharapkan dapat mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang material dan berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu.

c) *Accountability* (Akuntabilitas)

Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif berdasarkan *balance of power* antara manajer, pemegang saham, dewan komisaris dan auditor. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip akuntabilitas berhubungan dengan adanya sistem yang mengendalikn hubungan antara unit-unit pengawasan yang ada di perusahaan (Arifin, 2005). Bila prinsip *accountability* diterapkan secara efektif, maka ada kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab antara pemegang saham, Dewan Komisaris, serta Direksi. Dengan adanya kejelasan inilah maka perusahaan akan terhindar dari kondisi *agency problem* (benturan kepentingan peran).

d) *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan para pemegang kepentingan dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan. Ini merupakan tanggung jawab korporasi sebagai anggota masyarakat yang tunduk pada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat disekitarnya. Menurut Mas Achmad (2011:10), pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat, serta peraturan perundangan yang berlaku.

Di Indonesia sendiri upaya Upaya untuk menegakkan prinsip Good Corporate Governance pada perusahaan yang telah go-publik oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) sebagai *regulatory body* pasar modal di Indonesia terus berlangsung. Tujuannya adalah: (a) menjaga kelangsungan usaha perusahaan dengan pengelolaan yang lebih baik, struktur organisasi yang jelas, dan sistem informasi manajemen yang akurat. (b) mengurangi adanya *asymmetry information* dimana para agen umumnya menguasai lebih banyak informasi terinci mengenai kinerja perusahaan dibandingkan dengan prinsipal, dan (c) menjaga kepercayaan publik dengan pengungkapan informasi yang berkualitas dalam laporan tahunannya

Meskipun upaya penerapan GCG terus berlangsung, namun praktik GCG di perusahaan di Indonesia

masih ada kelemahan-kelemahan. Menurut Herwidayatmo (2000), praktik-praktik di Indonesia yang bertentangan dengan konsep GCG dapat dikelompokkan menjadi (a) adanya konsentrasi kepemilikan oleh pihak tertentu yang memungkinkan terjadinya hubungan afiliasi antara pemilik, pengawas dan direktur, (b) tidak efektifnya dewan komisaris, dan (c) lemahnya *law enforcement*.

Keberhasilan penerapan GCG juga dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Mas Achmad (2005: 15) mengemukakan mengenai faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG sebagai berikut:

- Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah berbagai faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GG. Diantaranya, terdapat sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif; adanya dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik atau lembaga pemerintahan; terdapat contoh pelaksanaan GCG yang tepat (*best practices*) yang dapat menjadi standar pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional; perbaikan lingkungan publik juga membawa pengaruh yang kuat dalam hal kualitas perusahaan dalam implementasi GCG.

- Faktor Internal

Faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan raktik GCG yang berasal dari dalam perusahaan, antara lain terdapatnya budaya perusahaan yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan; adanya berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG; adanya manajemen pengendalian risiko perusahaan yang didasarkan pada kaidah-kaidah standar GCG; adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahai dan mengikuti setiap perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.

Akuntan Manajemen

Akuntansi adalah aktivitas yang berfungsi menyajikan informasi yang pada dasarnya bersifat keuangan dari suatu satuan usaha atau organisasi tertentu, informasi tersebut dipakai oleh pihak internal maupun eksternal untuk pengambilan keputusan dengan memilih beberapa alternatif. Di dalam sebuah perusahaan tugas seorang akuntan manajemenlah untuk menghasilkan informasi tersebut.

Akuntan manajemen adalah salah satu profesi yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Peran akuntan manajemen dalam sebuah organisasi merupakan salah satu peran pendukung. Mereka membantu orang-orang yang bertanggung jawab melaksanakan tujuan dasar organisasi. Dalam hal ini peran akuntan manajemen adalah sebagai posisi staf (Hansen, Mowen, 2009: 18). Bambang, 2002: 20 mengatakan bahwa akuntan manajemen dapat bertindak sebagai pengawas intern usaha (*watchdog*) atau sebagai pembantu pelaksana manajemen (*helpers*). Sebagai pengawas intern, akuntan harus mencatat dan melaporkan (*scorekeeping*) apa adanya terhadap manajemen puncak mengenai kinerja atau prestasi masing-masing unit organisasi. Sedangkan sebagai pembantu pelaksana, peran akuntan adalah mengarahkan perhatian dan memotivasi manajemen untuk bekerja mencapai tujuan perusahaan (*attention directing*) dan membantu manajer dalam memecahkan persoalan yang dihadapi (*attention directing*) dan membantu manajer dalam memecahkan persoalan yang dihadapi (*problem solving*). Kedua fungsi ini bisa menimbulkan konflik kepentingan, karena sebagai pengawas intern, akuntan harus bersikap independen terhadap unit yang diawasinya, tapi di lain pihak sebagai pembantu pelaksana akuntan merupakan bagian tak terpisahkan dari manajemen.

Hasil survey yang dilakukan *Institute of Management Accountants (IMA)* menunjukkan bahwa terdapat 20 ciri-ciri akuntan (*knowledge, skills, abilities*) yang dikehendaki para top eksekutif sejumlah perusahaan besar di Amerika. Atas dasar rangking, dapat diurut ciri-ciri tersebut sebagai berikut (Bambang, 2002:19) :

Interpersonal skills, work ethic, understanding bottom-line implications. Analytical/ problem solving skills, understanding the business, leadership skills, listening skills, use of computerized spreadsheets, familiarity with business processes, relationship between balance sheet, income statement and cash flow statement, interpreting or analysing financial statements, understanding/ preparing financial statements, writing skills, the major responsibility of the financial executive, information needs of internal customers, purpose and use management information system in businessrelevant cost for decision making long range planning/budgeting, speaking/ presentation skills, measurement, valuation and presentation of revenues and expenses.

Dewasa ini, peran akuntan manajemen terus berkembang sejalan dengan makna luasnya transaksi bisnis yang dilakukan perusahaan. Manajer dihadapkan pada berbagai persoalan yang makin rumit dan sulit dikendalikan oleh karenanya, dukungan serta bantuan akuntan manajemen dalam mengarahkan dan mengendalikan operasi perusahaan semakin dibutuhkan oleh manajer puncak yag lain.

Dalam mengelola informasi akuntansi manajemen, tidak dapat diabaikan peran akuntan manajemen sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kelancaran arus informasi, keakuratan informasi tersebut serta kebenarannya dalam mendukung kepentingan manajemen. Akuntansi intern dapat berfungsi sebagai manajer keuangan dan manajer akuntansi. Dalam menjalankan salah satu peran itu, akuntan hanya dapat bertindak sebagai *scorekeeper* atau *controller* ataupun sebagai *advisor* dalam memecahkan persoalan-persoalan perusahaan.

Dalam proses pengambilan keputusan akuntan manajemen juga sangat berpengaruh. Para akuntan manajemen harus menyediakan data-data yang cukup lengkap tentang perhitungan masing-masing alternatif (Sucipto, 2004). Akuntan manajemen akan mengumpulkan dan mencatat data-data yang ada di perusahaan, baik yang bersifat moneter maupun non moneter dan juga data-data yang ada di luar perusahaan.

Terkait dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang akuntan manajemen, akuntan manajemen bertanggung jawab menjaga tingkat kompetensi profesional yang diperlukan dengan terus menerus mengembangkan pengetahuan dan keahliannya, melakukan kewajiban profesionalnya sesuai dengan hukum, peraturan, dan standar teknis yang berlaku, serta menyusun laporan dan rekomendasi yang lengkap serta jelas setelah melakukan analisis yang memadai terhadap informasi yang relevan dan andal.

Perilaku etis yang harus dilakukan oleh akuntan manajemen yang berkaitan dengan kerahasiaan antara lain adalah menahan diri untuk tidak mengungkapkan tanpa izin informasi rahasia yang diperoleh dari tempat kerjanya, kecuali diharuskan secara umum. Memberitahu bawahan seperlunya kerahasiaan dari informasi yang diperoleh dari tempat kerjanya, dan memonitor aktivitas mereka untuk menjaga kerahasiaan tersebut.

Salah satu perilaku etis lainnya yang harus dimiliki oleh seorang akuntan manajemen adalah integritas, dimana seorang akuntan manajemen harus dapat menghindari konflik internal dengan pihak perusahaan dan selalu mendiskusikan masalah yang timbul dengan top manajemen untuk mencari solusinya. Dan dari segi objektivitas, seorang akuntan manajemen bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan informasi dengan adil dan objektif, serta mengungkapkan semua informasi relevan yang diperkirakan dapat mempengaruhi pemahaman pengguna terhadap laporan, komentar, dan rekomendasi yang disajikan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data-data seperti literatur ilmiah, jurnal, buku, artikel, dokumen atau materi visual terkait dengan *Good Corporate Governance*, ilmu akuntansi, dan akuntan manajemen. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah survey literatur yang dijelaskan oleh Bordens & Abbott (2005: 60) sebagai proses menempatkan, mendapatkan, membaca, dan mengevaluasi literatur penelitian.

Teknik penelusuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Analisis isi merupakan sebuah metode penelitian yang tidak menggunakan manusia sebagai objek penelitian. Analisis isi menggunakan simbol, atau tulisan dalam media tertentu yang diolah dan dianalisis lebih lanjut. Bordens & Abbott (2005: 217-218) mengatakan bahwa analisis isi adalah teknik dengan menganalisis rekaman atau ucapan tertulis.

Nanang (2010:85) menjelaskan mengenai tahapan melakukan analisis isi, yaitu merumuskan masalah penelitian, melakukan studi pustaka, menentukan unit observasi dan analisis, menentukan variabel, mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, memberikan interpretasi dan yang terakhir menyusun laporan hasil penelitian.

D. PEMBAHASAN

Peran Akuntan Manajemen dalam Penerapan Prinsip GCG

Keterlibatan akuntan manajemen dalam sebuah perusahaan bukan hanya sebatas sebagai penyedia informasi yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. Lebih dari sekedar itu seorang akuntan manajemen menjadi salah satu barisan pertama yang bertanggung jawab dalam perkembangan sebuah perusahaan yang salah satunya tampak pada penerapan GCG.

Dalam hubungannya dengan penerapan GCG, peran akuntan manajemen secara signifikan terlibat dalam berbagai aktivitas penerapan masing-masing prinsip GCG sebagai berikut:

1. Prinsip Kewajaran (*Fairness*)

Laporan keuangan dikatakan wajar apabila laporan keuangan tersebut memperoleh opini atau pendapat wajar tanpa pengecualian dari akuntan publik, serta tidak mengandung salah saji material, disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Dalam prinsip kewajaran ini akuntan manajemen berperan membantu pihak *stakeholders* dalam menilai perkembangan suatu perusahaan dan membantu mereka untuk membandingkan kondisi perusahaan dengan perusahaan yang lainnya, oleh sebab itu laporan keuangan yang disajikan oleh akuntan manajemen harus memiliki daya banding. Daya banding akan diperoleh jika informasi yang disajikan secara konsisten baik dalam metode dan penyajiannya.

2. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)
Akuntabilitas merupakan tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif yaitu dengan dibentuknya komite audit. Akuntan manajemen melakukan tinjauan atas reliabilitas dan integritas informasi akuntansi dalam laporan keuangan dan laporan operasional lain beserta kriteria untuk mengukur, melakukan klasifikasi dan penyajian dari laporan tersebut. Untuk alasan itulah akuntan manajemen sangat diperlukan dan mempunyai peranan yang penting untuk menegakkan prinsip akuntabilitas.
3. Prinsip Transparansi (*Transparency*)
Prinsip transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung dengan kualitas penyajian informasi yang disampaikan perusahaan. Oleh karena itu akuntan manajemen dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu dan dapat dibandingkan dengan indikator-indikator yang sama. Untuk itu, informasi yang ada dalam perusahaan harus diukur, dicatat, dan dilaporkan oleh akuntan manajemen sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku. Peran akuntan manajemen menjadi penting terutama dalam hal penyajian informasi akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan secara transparan kepada para pemakai laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan salah satu aturan BAPEPAM yang menyatakan bahwa laporan keuangan perusahaan publik harus mengandung unsur keterbukaan (transparan) dengan mengungkapkan kejadian ekonomis yang bermanfaat kepada para pemakai laporan keuangan.
4. Prinsip Responsibilitas (*responsibility*)
Prinsip ini berhubungan dengan tanggung jawab perusahaan sebagai anggota masyarakat yaitu dengan cara mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis dan sebagainya. Prinsip ini berkaitan juga dengan kewajiban perusahaan untuk mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku. Kaitannya dengan hal ini, akuntan manajemen diharapkan dapat mengungkapkan informasi aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan aspek SEE (*Social, Ethical, dan environment*). akuntan manajemen yang menjadi top management, dapat membuat kebijakan-kebijakan yang mendorong penyajian Sustainability Reporting, sedangkan akuntan manajemen yang berada pada middle management dapat berperan dalam penilaian dan pengukuran aktivitas SEE (*Social, Ethical dan Environment*) perusahaan serta dampak yang dipengaruhinya.

E. KESIMPULAN

Persoalan yang muncul dalam perusahaan sehingga tidak dapat berkembang dengan baik adalah adanya tata kelola (*governance*) yang buruk, begitupula yang terjadi di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Buruknya tata kelola perusahaan adalah akibat adanya perilaku yang tidak diharapkan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan, juga karena tidak dilaksanakannya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut tidak akan terlepas dari peran akuntan manajemen yang dalam melaksanakan tugasnya dibatasi oleh kode etik dan selalu menjaga kepercayaan masyarakat. Salah satu tugas utama akuntan manajemen adalah sebagai penyaji informasi yang diperlukan oleh top manajemen dalam pengambilan keputusan seluruh aspek yang ada di perusahaan. Begitupun keputusan dalam penerapan GCG.

Dari masing-masing prinsip GCG yang coba diterapkan dalam perusahaan sebagai sebuah usaha untuk memperbaiki citra dan perkembangan perusahaan, akuntan manajemen memiliki peran yang cukup penting. Dari prinsip *fairness*, akuntan manajemen berperan untuk membantu *stakeholders* dalam menilai perkembangan perusahaan melalui penyajian informasi berupa laporan keuangan yang memiliki daya banding. Seorang akuntan manajemen berperan dalam penerapan prinsip *Accountability* melalui pengawasan atas reliabilitas dan integritas informasi baik informasi keuangan maupun non keuangan. Prinsip *transparency* yang berhubungan dengan kualitas informasi menjadikan akuntan manajemen berperan untuk menyajikan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu, dan dapat dibandingkan dengan indikator-indikator yang sama. Dan prinsip yang terakhir, yaitu *responsibility* yang berkaitan dengan hubungan perusahaan dengan lingkungan mewajibkan seorang akuntan manajemen mengungkapkan informasi aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan *Sosial, Ethical, and Environment*.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Mas Daniri. 2005. *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Ray Indonesia. Jakarta
- Anton, 2012. *Analisis Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan* Majalah Ilmiah INFORMATIKA Vol. 3 No. 1, Januari 2012 dalam <http://www.unaki.ac.id/ejournal/index.php/jurnal-informatika/article/download/4/3>
- Arifin. 2005. *Peran Akuntan Dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Di Indonesia (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan)*. dalam <http://eprints.undip.ac.id/333/1/Arifin.pdf>

- Belkoui, Ahmed Riahi. 2011. *Accounting theory*. Jakarta: Salemba Empat,
- Bordens, Kenneth S dan Bruce B Abbott. 2005. *Research Design and Method: A Process Approach*. New York : USA: Idea House Publishing
- Hansen, Mowen. 2009. *Management Accounting*. Jakarta: Salemba Empat
- Hariadi, Bambang. 2002. *Akuntansi Manajemen Suatu Sudut Pandang*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Herwidayatmo. (2000). 'Implementasi Good Corporate Governance untuk Perusahaan Publik di Indonesia'. *Majalah Usahawan*, Oktober, No.10/Th.XXIX. Dalam <http://www.inkindo-jateng.web.id/?p=779>
- IICG, 2001. "Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan". Edisi Ketiga, Jakarta
- Jati, Rianto Putranto dan Surya Raharjo. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Governance dalam Laporan Tahunan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Tahun 2008-2011*. Diponegoro Journal Of Accounting Volume 2 Tahun 2011. dalam <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accouting>
- Maksum, Azhar. 2005. *Tinjauan Atas Good Corporate Governance di Indonesia*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Akuntansi Manajemen pada Fakultas Ekonomi. dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/744/1/08E00104.pdf>
- Martono, Nanang. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Sucipto. *Penerapan Akuntansi Manajemen dalam Pengambilan Keputusan*. dalam <http://library.usu.ac.id/download/fe/akuntansi-sucipto4.pdf>
- Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara. Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam http://www.iicg.org/asset/doc/Kepmen_BUMN_2002_117_Praktek_GCG_BUMN.pdf
http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/kajian_pm/studi-2006/Studi-Penerapan-OECD.pdf